



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DODIK SRIANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **224429**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

659.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/168 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 135.130.000
2. Tanah Seluas 84 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/178 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 133.700.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 88.380.000
5. Tanah Seluas 400 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 114.000.000
6. Tanah Seluas 60 m² di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

131.150.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOTOR, HONDA C1M02N41LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.650.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

107.250.000**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

523.196.994**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

20.000.000



Sub Total	Rp.	1.441.246.994
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.441.246.994

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.